

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), untuk itu pemerintah menyelenggarakan pendidikan secara berkesinambungan di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah menetapkan tujuan pendidikan nasional secara konstitusional melalui Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan nasional untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat berilmu, kreativitas serta bertanggungjawab. Dalam undang-undang dimaksud secara lugas dan tegas dinyatakan pada pasal 1 ayat (1) bahwa:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Terdapat sejumlah alasan mengapa masyarakat dan semua komponen bangsa berkeharusan mengenyam pendidikan. Mulyasana (2015:11) menyebut beberapa alasan yang sangat menguatkan pandangan bahwa manusia mutlak membutuhkan pendidikan yaitu: pertama; bahwa kehidupan adalah lingkaran proses, kedua; pendidikan membantu manusia melakukan proses penyesuaian diri dengan tuntutan perubahan dan sesuatu yang baru, ketiga; pendidikan membantu melepaskan manusia dari kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan, keempat; pendidikan

membantu manusia melakukan proses pembentukan jati diri, kelima; pendidikan membantu memecahkan kesenjangan hidup di tengah kompleksitas perubahan.

Pemerintah juga membuat regulasi standar kompetensi lulusan secara khusus dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah RI No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada pasal 1 butir 4 yang berbunyi “Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap”.

Bentuk pendidikan yang terus ditumbuhkembangkan mengikuti dinamika perkembangan Dunia Usaha dan Dunia Kerja (DUDI) tingkat menengah adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang mengedepankan kemampuan dan keterampilan peserta didik dalam bidang keahlian yang diminati yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah Pasal 1 ayat 3 bahwa pendidikan kejuruan adalah pendidikan pada jenjang menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa SMK merupakan sekolah yang dibentuk untuk mengasah kemampuan peserta didik (hardskill) yang bertujuan untuk menyediakan lulusan yang siap untuk bekerja. Untuk mencetak lulusan yang unggul upaya yang dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan ialah dengan melihat aspek-aspek manajemen pendidikan, salah satunya yaitu dengan melihat aspek manajemen pembelajaran yang terselenggara di dalam pendidikan. Manajemen pembelajaran merupakan proses pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan atau proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebelum menyampaikan dan menyajikan

informasi kepada peserta didik (Setyosari, 2001:19). Mengacu pada pernyataan tersebut bahwa manajemen pembelajaran bertujuan untuk mengendalikan proses pembelajaran yang ada di kelas melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengevaluasian pembelajaran. Kecenderungan pendidikan Indonesia yang sekadar menghasilkan lulusan tanpa memperhatikan detail kemampuan lulusan mengakibatkan lulusan SMK semakin meningkat. Selain lulusan tersebut tidak bekerja sesuai dengan bidang yang diambil sewaktu sekolah, lulusan harus menunggu dalam waktu lama untuk memperoleh pekerjaan tersebut. Ditegaskan pula pada Peraturan Pemerintah 19/2005, standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai bidangnya.

Pertumbuhan SMK semakin cepat tetapi tidak berakibat signifikan pada meningkatnya kompetensi lulusan. Hal ini berakibat pada tingkat keterserapan yang tidak seimbang dengan antara jumlah angkatan kerja penerimaan pelaku usaha dan dunia industri, maka pernah pada suatu periode tertentu begitu santer isu bahwa SMK menyumbang cukup besar angka pengangguran. Keadaan itu pun ditimpali pandangan umum yang sampai saat ini seringkali mengemuka bahwa mutu lulusan pendidikan SMK di Indonesia masih sangat memprihatinkan, dan masih jauh dari harapan banyak pihak. Catatan dan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagaimana dilansir pada <https://www.bps.go.id/indicator/6/1179/1>, tergambar dalam statistik di bawah ini :

Tabel 1.1
Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan Tingkat Pendidikan		
	2020	2021	2022
Tidak/Belum Pernah & Tamat SD	3,61	3,61	3,59
SMP	6,46	6,45	5,95
SMA umum	9,86	9,09	8,57
SMA kejuruan	13,55	11,13	9,42
Diploma I/II/III	8,08	5,87	4,59
Universitas	7,35	5,98	4,80

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tingkat pengangguran terbuka tahun 2022 berdasarkan tingkat pendidikan, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) paling banyak menyumbang angka pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka sektor pendidikan dari jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 5,95%, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 8,57%, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 9,42%, Diploma I/II/III sebesar 4,59 dan Universitas 4,80%.

Badan Pusat Statistik (BPS) pada laman <https://www.bps.go.id>, menyampaikan data tahun 2023 bahwa:

“Jumlah Angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Februari 2023 sebanyak 146,62 juta orang, naik 2,61 juta orang dibanding Februari 2022. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,24 persen poin. Penduduk yang bekerja sebanyak 138,63 juta orang, naik sebanyak 3,02 juta orang dari Februari 2022. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan dan Minum serta aktivitas jasa lainnya, masing-masing sebesar 0,51 juta orang. Sebanyak 83,34 juta orang (60,12 persen) bekerja pada kegiatan informal, naik 0,15 persen poin dibanding Februari 2022. Persentase setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu mengalami penurunan, masing-masing sebesar 0,95 persen poin dan 0,33 persen poin dibandingkan Februari 2022. Jumlah pekerja komuter Februari 2023 sebesar 7,18 juta orang, naik sebesar 0,11 juta orang dibanding Februari 2022. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Februari 2023 sebesar 5,45 persen, turun sebesar 0,38 persen poin dibandingkan dengan Februari 2022. Terdapat 3,60 juta orang (1,70 persen) penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID -19 (0,20 juta orang); Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (0,26 juta orang); sementara tidak bekerja karena COVID-19 (0,07 juta orang); dan penduduk bekerja mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (3,07 juta orang)”.

Data di atas menunjukkan, penduduk yang bekerja sebanyak 138,63 juta orang, naik sebanyak 3,02 juta orang dari Februari 2022, lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum serta aktivitas jasa lainnya. Hal ini menarik diteliti sebab data menunjukkan bahwa lulusan SMK sebagai penyumbang pengangguran tertinggi, data lain menunjukkan peningkatan tingkat ke bekerjaan pada sektor jasa pelayanan. Gambaran di lapangan menunjukkan bahwa sebagian lulusan SMK yang telah bekerja di industri kurang mampu beradaptasi dengan lingkungan dan sarana prasarana yang ada di industri, sehingga tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi industri yang selaras dengan bidangnya. Lebih dari itu, kurang tepat dalam mengoperasikan sarana yang sewajarnya dikuasai. Kenyataan seperti ini diakibatkan oleh ketidakpercayaan dan keraguan terhadap penguasaan teori dan kemampuan praktik yang diperoleh selama di sekolah. Hal lain mungkin diakibatkan oleh fasilitas sekolah yang peralatan praktiknya sangat minim, sehingga peserta didik tidak sepenuhnya melaksanakan praktik sesuai dengan kurikulum.

Berdasarkan pengamatan empiris yang dilakukan Depdiknas (2004:1), diperoleh informasi bahwa:

“Sebagian besar lulusan SMK di Indonesia bukan saja kurang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi, tetapi juga kurang mampu mengembangkan diri dan kariernya di tempat kerja. Kualifikasi calon tenaga kerja yang dibutuhkan dunia industri di samping syarat keilmuan dan keterampilan juga serangkaian kemampuan non teknis yang tidak terlihat wujudnya (*intangible*) namun sangat diperlukan yang disebut dengan *soft skill* didefinisikan sebagai pelaku personal dan interpersonal yang mengembangkan dan memaksimalkan kinerja humanis, termasuk diantaranya kemampuan berkomunikasi, bersosialisasi, bekerja dalam tim, ketahanan mental, disiplin, tanggung jawab dan atribut *soft skill* lainnya. Selama ini peserta didik di SMK lebih banyak mendapatkan *hard skill* dan lupa terhadap *soft skill*, sehingga kelemahan lulusan SMK dalam mengisi peluang kerja pada umumnya adalah masalah personal *skill*”.

(sumber <http://www.dikti.go.id/index/php>)

Mengingat pemosisian SMK di Indonesia sebagai satuan pendidikan yang menjadi tumpuan untuk membangun SDM terampil, pemerintah sudah melakukan banyak hal positif dan dukungan yang lebih baik. Pada rencana startegis SMK yang terakhir secara eksplisit dinyatakan bahwa dalam menyiapkan lulusan terampil dan kompeten dari SMK, pemerintah menambah fasilitas belajar dengan menambah unit sekolah baru, ruang kelas baru dan sarana prasarana pendukung lainnya. Beberapa bidang yang menjadi perhatian khusus pemerintah sebagai sektor unggulan, bidang kemaritiman yang terdiri dari perikanan dan kelautan, bidang pariwisata, bidang pertanian serta bidang industri kreatif adalah lima sektor unggulan yang jika potensinya diolah dengan baik dapat membuka peluang usaha dan bursa tenaga kerja siap pakai.

Berkembangnya industri pariwisata di Indonesia merupakan salah satu instrumen yang berpotensi sebagai penyerap tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja sangatlah besar, tetapi harus diikuti oleh keterampilan *hard skill* dan *softskill* yang dibutuhkan industri. Oleh karena itu maka SMK harus melaksanakan kerjasama

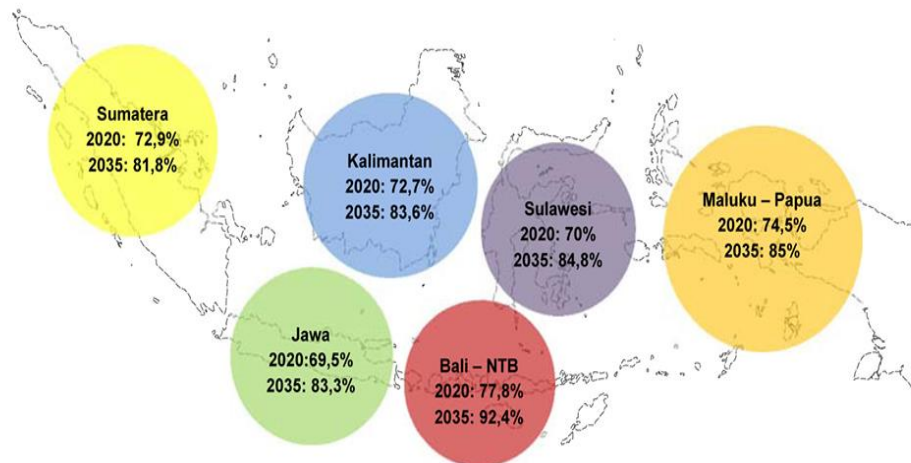
sesuai dengan Kepmendikbudristek No. 165/M/2021 tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan yang mengatur pelaksanaan kemitraan *link and match* secara menyeluruh sesuai kesepakatan dengan dunia industri.

Sejak tahun 90-an pemerintah telah mencanangkan *link and match* antara pendidikan vokasi dan industri. Pendidikan vokasi pariwisata mengedepankan keterampilan yang menggabungkan pengetahuan teknis dengan penggabungan pengetahuan teknis dengan pembangunan karakter *hospitality*. Keterampilan ini membutuhkan pengembangan yang berkesinambungan sejalan dengan perkembangan di industri. Di sisi lain kurikulum yang berlaku mengikat sekolah sedemikian rupa, sehingga perkembangan industri melampaui pembaruan kurikulum. Akibatnya timbul jurang pengetahuan dan keterampilan antara sumber daya manusia di sekolah vokasi sehingga perlu mengikuti pelatihan-pelatihan tambahan untuk mengejar ketertinggalan itu. Kondisi kesenjangan ini bisa berdampak pada tingkat kompetitifnya sumber daya manusia pariwisata di pasar tenaga kerja, baik di tingkat regional maupun tingkat global.

Kualitas sumber daya manusia pariwisata sering menjadi persoalan bagi industri pariwisata karena adanya kesenjangan antara kualitas sumber daya manusia di SMK dan kemajuan industri yang sangat pesat. Tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas, industri akan menghadapi tantangan dalam menjalankan usahanya karena sumber daya yang berkualitas adalah bagian dari modal strategis perusahaan dan akan mengalami kesulitan dalam persaingan di dunia usaha pariwisata. Selain itu kebutuhan tenaga kerja di dunia pariwisata sangat besar tetapi lulusan dari SMK tidak mencukupi. Seperti dalam gambar di bawah ini:

GAMBAR 2.1. Proyeksi komposisi jumlah kebutuhan tenaga kerja sektor industri jenjang pendidikan SMK per wilayah pada tahun 2035

Sumber: Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kerja Industri, Kemenperin (2015)



Banyak aspek fundamental (keterampilan dasar, kemampuan berpikir, kualitas diri) dan teknis yang seharusnya sudah ada dalam diri lulusan vokasi, tetapi seringkali industri harus melakukan pelatihan untuk aspek-aspek tersebut karena lulusan sekolah vokasi belum siap terjun langsung di dunia industri pariwisata yang sedang berjalan. Situasi ini tidak menguntungkan bagi industri pariwisata dari sisi penyerapan tenaga kerja yang berdampak bagi kegiatan usahanya. Sehingga diperlukan adanya kerjasama/kolaborasi sekolah dengan DUDI karena dapat turut membentuk kualitas sumber daya yang sejalan dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi di industri dalam hal :

- 1) penyusunan dan penyesuaian kurikulum berbasis industri dan dunia industri,
- 2) pembelajaran berbasis proyek nyata (produk barang/jasa) dari dunia industri,
- 3) pelibatan guru/pengajar tamu dari industri dan dunia industri,
- 4) penyelenggaraan program praktek kerja lapangan,
- 5) penyelenggaraan sertifikasi kompetensi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia

industri bagi lulusan, 6) pelatihan guru di SMK oleh industri, 7) pembuatan komitmen dengan dunia industri terhadap penyerapan lulusan SMK; dan 8) pemberian beasiswa dan/atau ikatan dinas oleh dunia industri bagi peserta didik SMK.

Sesuai dengan Rencana Strategi Kemendikbud tahun 2021-2024 untuk pendidikan vokasi khususnya SMK adalah meningkatkan pendidikan SMK yang berstandar industri dengan indikator kinerja : a) meningkatnya jumlah guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri b) Meningkatnya persentase SMK yang dikembangkan menjadi *Center of Excellence (COE)* per bidang keahlian c) Meningkatnya persentase SMK yang sumber daya (resources)nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerja sama profesional d) Meningkatnya persentase SMK yang memperoleh status BLUD e) Meningkatnya persentase SMK yang menyelenggarakan *Teaching Factory*. Rencana Strategi SMK terakhir secara umum menggambarkan dukungan dan keseriusan dalam meningkatkan mutu dan keselarasan lulusan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Hal itu membesarkan optimisme untuk bangkitnya kembali SMK dari segala kekurangan menjadi lembaga unggulan memenuhi harapan masyarakat.

Peningkatan kualitas SDM dalam rangka revitalisasi pendidikan vokasi sangatlah penting. Pembangunan SDM Vokasi harus disesuaikan dengan sektor-sektor prioritas. Pada tahun 2020, sektor prioritas pengembangan bidang vokasi, meliputi : 1) mesin; 2) konstruksi; 3) ekonomi kreatif; 4) pariwisata dan perhotelan; dan 5) jasa keperawatan. Sedangkan untuk tahun-tahun selanjutnya direncanakan

akan dikembangkan beberapa sektor tambahan yang lain, yaitu : 1) teknologi manufaktur; 2) kemaritiman; 3) agribisnis dan agroteknologi; 4) teknologi informasi dan komunikasi; 5) kesehatan dan pekerjaan sosial; 6) energi pertambangan dan lingkungan, serta 7) Bisnis dan manajemen (Bappenas, 2019; WEF, 2018; Mc. Kinsey and Company, 2019; BLS Projection, 2014; OECD, 2018). Oleh karena itu, diperlukan sinergitas antara pemerintah dengan stakeholder melalui kebijakan peningkatan kemitraan dalam rangka *link and match* antara lembaga/satuan pendidikan vokasi dengan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja guna meningkatkan kualitas SDM lulusan pendidikan vokasi.

Salah satu kebijakan pemerintah untuk menyukseskan program Revitalisasi SMK adalah Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 3 tahun 2017. Secara filosofis, *link and match* mengandung makna wawasan pengembangan SDM, masa depan, mutu dan keunggulan, profesionalisme, nilai tambah dan efisiensi, *link and match* menyangkut proses interaktif dengan hasil yang sesuai (Wardiman dalam Murnomo, 2010). Secara teoritis, *link and match* mengacu pada keterkaitan (*link*) dan kesesuaian (*match*) kompetensi lulusan dari dunia pendidikan agar dapat diterima dan cocok dengan kebutuhan dunia kerja.

Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa sudah seharusnya dunia pendidikan dapat menjalin kerjasama dengan semua pihak yang terkait dengan dunia usaha dan dunia industri.

Terkait menciptakan pertautan dan keselarasan antara lulusan SMK dengan kebutuhan dunia industri (*link and match*), Sumbodo dkk (2018) menyatakan pengelolaan SMK berbasis industri mencakup sebelas aspek (proposisi), yaitu : (a)

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) akan lebih efektif jika memiliki mitra industri yang relevan dengan program keterampilan yang dikembangkannya, (b) Kemitraan SMK dengan industri akan efektif jika berorientasi pada kebutuhan industri, (c) SMK merupakan mitra industri dalam menyiapkan sumber daya manusia, oleh karena itu SMK akan lebih efektif ketika hanya menyiapkan lulusan yang siap bekerja, (d) Proses belajar dan pelatihan yang diselenggarakan oleh SMK harus identik dengan jenis pekerjaan yang diterapkan dalam industri mitra, (e) Kemitraan SMK dengan industri akan berarti jika mereka dapat mendukung pertumbuhan industri di era global, (f) Kemitraan SMK dengan industri akan terus berlanjut jika memiliki manfaat yang diperoleh oleh pihak-pihak yang bermitra, (g) Manfaat yang dapat mengabadikan kemitraan SMK dengan industri antara lain: manfaat pengembangan sumber daya manusia, manfaat akses, manfaat kualitas produk, dan efisiensi, (h) Keberadaan SMK akan lebih bermanfaat bagi industri jika mampu mempersiapkan lulusannya untuk dapat bekerja di bidang pekerjaan tertentu sebagaimana disyaratkan oleh industri mitra, (i) Kemitraan SMK dengan industri membutuhkan kesepakatan yang disepakati bersama, (j) Kemitraan SMK dengan industri memungkinkan beberapa proses pembelajaran/pelatihan untuk diimplementasikan dalam industri, oleh karena itu sekolah dan industri perlu mengalokasikan dana kemitraan, (k) Pemanfaatan kemitraan SMK yang optimal dengan sistem informasi industri dapat mengefisienkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kemitraan, salah satu upayanya adalah menyelenggarakan pembelajaran berbasis industri dengan tata kelola yang baik. Pembelajaran berbasis industri atau pembelajaran industri (*teaching industry*) adalah suatu bentuk usaha

memberikan pengalaman nyata kepada peserta didik dengan melibatkan peserta didik dalam lini produksi atau jasa di industri atau di sekolah dengan melibatkan peserta didik secara langsung (Sutiana : 2014). Pembelajaran industri ini tentu saja berbeda dengan pembelajaran lainnya. Peserta didik dalam proses pembelajaran berbasis industri memperoleh pengalaman langsung atau nyata sesuai dengan kebutuhan industri, dan ditujukan mengkondisikan peserta didik ke dalam situasi proses produksi yang sebenarnya pada industri, dengan menyajikan materi yang dikombinasikan materi kurikulum yang ada dengan materi dari pihak industri, sehingga terjadi sinkronisasi antara kedua materi tersebut.

Terwujudnya *link and match* dalam pembelajaran berbasis industri sebagai fokus pengelola pengelola SMK. Kebutuhan lulusan untuk memiliki kompetensi yang sesuai dengan keinginan dunia usaha dan dunia industri terwadahi, bersamaan dengan terpenuhinya harapan pelaku industri dan usaha/bisnis. Dalam hal ini kerjasama SMK dengan pihak industri menjadi mutlak untuk menemukan proses dan desain program pembelajaran yang dapat menumbuhkan daya saing lembaga pendidikan melalui keterserapan lulusannya di lingkungan dunia usaha dan dunia industri.

Kerjasama pembelajaran berbasis industri sepenuhnya berorientasi pada luaran atau *output* lulusan yang memiliki kompetensi yang sejalan dengan tujuan pendidikan. Kompetensi lulusan yang dimaksud merupakan standar kompetensi kerja yang disyaratkan oleh dunia industri untuk dapat diterima sebagai lulusan siap kerja. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia menurut Permenakertrans No.5 tahun 2012 adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek

pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kompetensi dalam pendidikan dimaknai sebagai proses sistematis untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia dengan menjadi pembelajar sepanjang hayat (*long life learned*), mencakup tiga kompetensi yaitu: (a) *Kognitif*, terlihat pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, (b) *Afektif* yang tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia dan kepribadian unggul dan (c) *Psikomotorik* yang dicerminkan oleh keterampilan dan kecakapan teknis.

Menurut hasil penelitian Murnomo (2010:79) dan Sutrisno & Ixtiarto (2016:61) bahwa pendidikan kejuruan yang saat ini berhasil dikembangkan adalah pendidikan yang mengacu pada tuntutan dunia kerja, menjalin kerja sama dengan kemitraan yaitu DUDI yang berkembang di masyarakat. Kolaborasi lembaga pendidikan dan industri sangat menentukan keberhasilan pendidikan vokasi dan kejuruan, terutama dalam memberikan masukan terhadap kompetensi dan standarisasi kemampuan peserta didik lulusan pendidikan vokasi dan kejuruan (Murnomo, 2010:79). Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari Dwimawanti, Fathurrohman & Matrom (2002), bahwa hasil pelaksanaan program *link and match* pada SMK dapat dikatakan berhasil dikarenakan mampu memberikan manfaat bagi peningkatan keterampilan siswa, meningkatkan wawasan kerja dan IPTEK, dan meningkatkan rasa percaya diri untuk bersaing masuk bursa kerja. Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan

program *link and match* sangat ditentukan oleh adanya kerjasama antara sekolah dengan industri sehingga dapat menunjang kompetensi siswa agar mampu bersaing di dunia kerja.

The Jayakarta Suites Hotel Bandung salah satu industri hotel yang melaksanakan kerjasama dengan beberapa SMK perhotelan tetapi penulis tertarik untuk melakukan penelitian kepada SMK YPPS Sumedang dan SMK Karnas Kadipaten Majalengka, karena kedua SMK tersebut memiliki persamaan dan juga perbedaan. Persamaanya: (a) Mitra Industri, menjalin kemitraan industri yang sama yaitu hotel The Jayakarta Suites Bandung, (b) kompetensi keahlian, memiliki kompetensi yang sama perhotelan. (c) kurikulum, memiliki kurikulum berbasis industri (d) lokasi: sama-sama terdampak tol. Perbedaannya antara lain. (a) pembiayaan, SMK YPPS masih memungut partisipasi dari orang tua sedangkan SMK Karnas tidak ada pungutan, (b) sarana dan prasarana, SMK YPPS sudah berstandar industri sedangkan SMK Karnas belum berstandar industri. (c) Guru tenaga kependidikan, SMK Karnas tidak memiliki guru praktisi sedangkan YPPS memiliki guru praktisi dari industri.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YPPS Sumedang di Kabupaten Sumedang terdampak pembangunan tol Cisumdawu dan SMK Karnas Kadipaten di Kabupaten Majalengka terdampak pembangunan Bandara memiliki peluang yang sangat besar bagi dunia pariwisata telah mengimplementasikan program *link and match* sebagaimana dimaksud di atas. Kedua SMK tersebut di atas memiliki program yang sama yaitu keahlian Perhotelan yang sejalan dengan bidang usaha mitra industri The Jayakarta Suites Hotel Bandung. Sehingga kurikulum diatur

sedemikian rupa di bawah prinsip keterpaduan antara kurikulum pembelajaran nasional dengan pembelajaran berbasis industri. Kehadiran dunia industri dalam pembelajaran sekolah kejuruan ini tertuang dalam kesepahaman bersama MOU (*memorandum of understanding*) kedua SMK tersebut sesuai dengan Kepmenbudristek No.165/M/2021 tentang SMK Pusat Keunggulan yang mengatur pelaksanaan kemitraan *link and match* secara menyeluruh sesuai kesepakatan dengan dunia industri.

Pembelajaran berbasis industri menjadi komitmen bersama antara kedua SMK tersebut dengan The Jayakarta Suites Hotel Bandung dalam mencetak lulusan yang memiliki kompetensi sehingga mudah diserap oleh dunia industri terutama bidang keahlian perhotelan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki oleh SMK YPPS Sumedang dan SMK Karnas Kadipaten.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan, sejauh ini terindikasi adanya permasalahan terkait upaya meningkatkan kompetensi lulusan. Beberapa di antaranya adalah : (a) Kurikulum tidak sesuai dengan kebutuhan industri, (b) Sarana dan prasarana yang belum memadai, (c) Praktek kerja industri tidak optimal, (d) Keterlibatan industri belum optimal, (e) Tingkat ke bekerjaan lulusan rendah, (f) Instruktur industri kurang cakap dalam mentransfer ilmu dan (g) Pengajar produktif tidak memiliki pengalaman di industri. Permasalahan ini menjadi beban yang perlu ditangani dengan baik, dan tentu diperlukan tata kelola pembelajaran yang memadai. Menurut Nurcahyono, dkk (2020), tantangan dan hambatan pembelajaran berbasis industri dalam upaya meningkatkan kompetensi peserta didik adalah implementasi kurikulum berbasis industri yang penerapannya

memiliki masalah: (a) Ketidakmauan sekolah mengubah prinsip sekolah sesuai tuntutan dan kebutuhan dunia usaha/dunia industri, (b) Fokus pada pengetahuan (*focus on knowledge*), sekolah hanya fokus pada pembelajaran teori tidak melibatkan dunia usaha/industri dalam desain pembelajarannya, (c) Target sekolah hanya pada kelulusan peserta didik bukan pada distribusi/keterserapan kerja di industri, (d) Jaringan yang buruk dengan industri.

Menurut Sudarsono dkk (2022), hambatan dalam upaya peningkatan kesiapan kerja peserta didik disebabkan oleh: (a) Kurangnya pemahaman guru terkait sikap, pengetahuan dan keterampilan kerja di industri sehingga materi yang diberikan siswa masih terbatas pengalaman dan referensi pribadi, (b). Materi budaya kerja di industri selama ini belum pernah diberikan kepada siswa, (c) Sarana dan prasarana pembelajaran belum berorientasi industri.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas sangat penting dilakukan studi mendalam tentang bagaimana pembelajaran berbasis industri di SMK itu sejauh ini dikelola, untuk mendapatkan solusi tentang bagaimana sebaiknya manajemen pembelajaran berbasis industri itu diterapkan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Analisis Manajemen Pembelajaran Berbasis Industri Dalam Meningkatkan Kompetensi Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Prodi Perhotelan”**.

Penelitian ini dilaksanakan di dua sekolah yaitu SMK YPPS Sumedang dan SMK Karnas Kadipaten yang melakukan kerjasama dengan The Jayakarta Suites Hotel Bandung.

1.2. Identifikasi Masalah

Beberapa masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Manajemen Pembelajaran Berbasis Industri yang dilaksanakan di The Jakarta Suites Hotel Bandung.
- 2) Bagaimana tanggapan dunia industri terhadap kompetensi peserta didik SMK YPPS dan SMK Karnas pada saat pelaksanaan sesudah dan sebelum magang.
- 3) Bagaimana tanggapan peserta didik praktikan terhadap pelaksanaan magang berbasis industri.
- 4) Bagaimana kebijakan manajemen industri dan sekolah dalam upaya peningkatan kesiapan kerja peserta didik melalui pembelajaran berbasis industri.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh gambaran dan mengkaji tentang:

- 1) Manajemen Pembelajaran Berbasis Industri yang dilaksanakan di The Jakarta Suites Hotel Bandung
- 2) Tanggapan dunia industri terhadap kompetensi peserta didik SMK YPPS dan SMK Karnas pada saat sebelum dan sesudah magang
- 3) Bagaimana tanggapan peserta didik praktikan terhadap pelaksanaan magang berbasis industri
- 4) Kebijakan manajemen industri dan sekolah dalam upaya peningkatan kesiapan kerja peserta didik melalui pembelajaran berbasis industri.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan khasanah pengetahuan dan keilmuan terkait penerapan manajemen pembelajaran berbasis industri dalam upaya menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha/dunia industri.

1.4.2 Manfaat Akademis

Secara akademis diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat pengembangan pendidikan
2. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan
3. Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama.